

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nurtjahjo, Hendra. Yustus, Maturbongs dan Diani, indah Rachamitasari. *Memahami Maladministrasi*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.)

Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12. (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016).

D Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi implementasi dan evaluasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003)

Lotulung, Paulus Effendi. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Cetakan ke – 1. (Jakarta: PT. Bhuanan Ilmu Populer, 1986).

Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah*. (Bandung: P.T Alumni, 2004).

Kusnardi, Moh dan Saragih, Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-7 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015).

Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum terhadap sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992).

Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983

Mustopo, M. Habib, *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983),

Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke – 10. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Cekli Setya Pratiwi, Chrustina Yulia, Shinta Ayu Purnamawita, *Pejelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Idependensi Peradilan, 2016).

Suharto, Edi “Penerapan Kebijakan Pelayan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus”, (Bogor: Lembaga Adminstrasi Negara 2008).

Sidharta, B. Arief “butiir-butir pemikiran dalam hukum”, (Jakarta: Refika Aditama, 2011)

Asshiddiqie, Jimly “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Joko Widodo. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cedekia. Surabaya.

Dwisvima, Inge keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum, *junral dinamika hukum*, Vol. 11, No 3 Tahun 2011.

Wahyudi, Agus “Filsafat politik barat dan masalah keadilan catatan kritis atas pemikiran will kymlicka”, *Volume 14, No 1 Tahun 2004*.

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2009.

Jeremy Bentham,”Teori perundang-undnaganan, prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum pidana”, (The Theory of legislation) diterjemahkan oleh Nurhadi, MA, (Bandung Nusamedia, 2010).

Moh Mahfud MD,”Keniscayaan reformasi hukum: “upaya menjaga jati diri dan martabat bangsa”, makalah dalam konvensi Kampus VI dan temu tahunan XII forum rektor indoneisa (FRI) di universitas Tanjung pontianak,9 januari 2011.

Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta:Rajag Grafindo Persada, 2009).

Arianto Satya, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta:Rajag Grafindo Persada, 2009).

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006).

Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, (Yogyakarta: FH UII, 2009).

B. Peraturan perundang undangan

Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.*

_____. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009)*

_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang Pedoman Statuta dan Organissi Perguruan Tinggi Nomor 139 Tahun 2014.

_____. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.

_____. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2009 tentang penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Negeri

_____. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/DKTI/kep/2009 tentang pedoman penilaian Ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang berlaku

_____. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang jabatan fungsional Dosen dan Angka kreditnya yang berlaku pada saat penetapan angka kredit dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai guru besar.

_____. Rekomendasi Ombudsman 0001/REK/0834.2016/V/2018

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 6/P/FP/2019/PTUN-JKT.

D. Rekomendasi Ombudsman

Rekomendasi Ombudsman nomor 001/REK/0834.2016/V/2018.

E. Jurnal Hukum

Agus Bandiyono, "Penerapan pelayanan Publik di kantor pelayanan pajak", jurnal demokrasi dan otonomi daerah, jilid 16,, tahun 2016.

Moenir, Drs. H.A.S ,Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Suharto, Edi "Penerapan Kebijakan Pelayan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus", (Bogor: Lembaga Administrasi Negara 2008)

Asshiddiqie, Jimly "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Dwi Putra, Billy Juniarta , "Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam tidnak PIDana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi Negara", Tahun 2019,.

Panjaitan, Marojahan JS "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, Tahun 2018.

Charda S, Ujang "Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik", Jurnal Wawasan Yuridika, Edisi No 2, Tahun 2012.

Mohi, Widya Kurniati , Irmanovika Mahmud, "Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potangan Kecamatan Boliyohuyo Kabupaten Gorontalo, Volume 6 No 2, Tahun 2018.

F. Makalah

Hikmahanto Juwanan dalam Dwidja Priyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan”, Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan, (Bandung: PPs Unisaba, 2010).

Romli Atmasasmita, “Korupsi dikalangan Legislatif”, Makalah pada Seminar Korupsi di Kalangan Legislatif, (Bandung: ikadin, 2004).

G. Situs Internet

Anonim, “Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia”, *www.id.wikipedia.org*, 29 Oktober 2019.

Anonim, “Ini Empat Tahap Pemilihan Pucuk Pimpinan PTN”, *www.kelembagaan.ristekdikti.go.id*, 29 Oktober 2019.

Anonim, “Tergugat Jokowi dan Menristekdikti Tak hadir Sidang ke 4 terkait Ijazah Palsu Rektor Unima”, *www.kabartoday.co.id*, 29 Oktober 2019.